

**PENGEMBANGAN POTENSI BAWANG MERAH OLEH PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN ENREKANG**



**MUH FADIL S**

**E041201045**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**PENGEMBANGAN POTENSI BAWANG MERAH OLEH PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

**MUH FADIL S**

**E041201045**



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN PENGAJUAN**

**PENGEMBANGAN POTENSI BAWANG MERAH OLEH PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

**MUH FADIL S**

**E041201045**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Politik

pada

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

“Pengembangan Potensi Bawang Merah Oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Enrekang”

Disusun dan Diajukan oleh

MUH FADIL S

E041201045

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

NIP. 197109171997031001



Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.

NIP. 19730813 199802 2 001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Politik



Dr. H. Andi Yakub, M.Si., Ph. D.

NIP. 196921231 199003 1 023

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "**PENGEMBANGAN POTENSI BAWANG MERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG**" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (**Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.** sebagai Pembimbing Utama dan **Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.** sebagai Pembimbing Pendamping). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 Februari 2024



Muh Fadil S  
E041201045

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan petunjuknya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul **“Pengembangan Potensi Bawang Merah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang”**. Penyusunan skripsi ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Srata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis ucapkan terima kasih kepada orang terhebat yang dikirimkan Tuhan kepada penulis, yaitu kedua orang tua tercinta, Bapak Samsuddin dan Ibu Ani yang selalu memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tanpa pamrih yang tentu takan pernah bisa penulis balas. Kepada saudari penulis Nada Samsuddin S.pd terima kasih sudah menjadi saudari yang terbaik yang selalu memberikan support dan semangat kepada adik tercintanya ini karena hanya 2 bersaudara yang menjadi tempat bercerita suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP.,M.Si. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya dan membimbing penulis selama menyusun skripsi. Terima kasih atas kesabaran dan arahan yang diberikan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Juga penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat mengemban ilmu di Program Studi Ilmu Politik.
2. Bapak Prof. Dr. Phil Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph. D., selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan kemudahan penulis dalam urusan-urusan administrasi di Departemen Ilmu Politik.
4. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di jurusan Ilmu Politik.
5. Seluruh Tata Usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.

6. Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang beserta jajarannya dan seluruh informan yang telah menerima untuk melakukan penelitian serta menyediakan data yang dibutuhkan.
7. Keluarga besar HIMAPOL Fisip Unhas Terima kasih telah senantiasa memberikan dukungan, dorongan, dan kesempatan sebagai tempat untuk belajar dan mendapatkan pengalaman dalam berorganisasi.
8. Keluarga besar HMB terima kasih telah menjadi rumah dan senantiasa memberikan dukungan kepada penulis yang turut memberikan warna dalam cerita masa muda.
9. Teman-teman KKNT Anrihua Gel-110 yang selalu memberikan semangat dan berbagi pengalaman kepada penulis.
10. Teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) khususnya Komisariat Unhas yang selalu mensupport, memberikan nasehat, doa dan harapan penulis selama Menyusun skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang penulis tidak sempat sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 20 Februari 2024

Penyusun

**Muh Fadil S**

## ABSTRAK

**Muh Fadil S, E041201045. Pengembangan Potensi Bawang Merah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad, S.IP.,M.Si. dan Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**

---

---

**Latar Belakang.** Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang terus berupaya untuk mengembangkan potensi bawang merah melalui berbagai program diantaranya yaitu (1) program Gerakan Dorong Produksi, Daya Saing dan Ramah Lingkungan Hortikultura (Gedor Horti) yang merupakan Gerakan terpadu yang mengkombinasikan berbagai strategi untuk menggolkan target peningkatan produksi bawang merah berkualitas di Enrekang. (2) Program *Electrifying Agriculture* yang merupakan Kerjasama anatar PLN dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yang bertujuan untuk meningkatkan layanan listrik agar lebih mudah dan terjangkau untuk kalangan petani bawang merah. (3) Program lainnya yaitu bantuan mesin pengolah lahan pertanian (*cultivator*) dan bantuan pembangunan embung untuk para petani bawang merah. Produktivitas bawang merah yang meningkat akan memberikan kesejahteraan untuk para petani bawang merah di Kabupaten Enrekang. **Tujuan.** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menyediakan embung untuk seluruh kelompok tani bawang merah. **Metode.** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang akan menyajikan gambaran yang faktual mengenai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam mengembangkan produktivitas bawang merah melalui program kebijakan pembangunan embung. **Hasil.** Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa bantuan pembangunan embung telah efektif meningkatkan potensi pertanian bawang merah di Kabupaten Enrekang, sehingga mampu menekan laju inflasi dan memberikan kesejahteraan kepada petani. Walaupun kebijakan bantuan pembangunan embung belum dapat direalisasikan secara merata bagi semua kelompok tani karena adanya keterbatasan anggaran, namun implementasi kebijakan ini telah membawa dampak positif. **Kesimpulan.** Adapun upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang untuk mengembangkan potensi bawang merah yaitu melalui kebijakan pembangunan embung yang telah terbukti dapat meningkatkan produksi bawang merah yang ada di Kabupaten Enrekang, walaupun kebijakan ini masih belum merata untuk semua petani bawang merah dikarenakan adanya beberapa hambatan.

**Kata Kunci:** Pengembangan, Embung, Bawang Merah



## ABSTRACT

**Muh Fadil S, E041201045. *Development Of Shallot Potential by The Enrekang Distric Government.*** Supervised by **Prof. Dr. Muhammad, S.IP.,M.Si. dan Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**

---

---

**Background.** The Regional Government of Enrekang Regency continues to strive to develop the potential of shallots through various programs including (1) the Movement to Encourage Production, Competitiveness and Environmentally Friendly Horticulture (Gedor Horti) program which is an integrated movement that combines various strategies to achieve targets for increasing quality shallot production in Enrekang. (2) The Electrifying Agriculture Program, which is a collaboration between PLN and the Regional Government of Enrekang Regency which aims to improve electricity services so that they are easier and more affordable for shallot farmers. (3) Other programs include assistance with agricultural land processing machines (cultivators) and assistance in building reservoirs for shallot farmers. Increased shallot productivity will provide prosperity for shallot farmers in Enrekang Regency.

**Objective.** The aim of this research is to determine the Enrekang Regency government's efforts to provide reservoirs for all shallot farming groups. **Method.** This research uses a qualitative descriptive approach with data collection methods through interviews and documentation, which will present a factual picture of the Enrekang Regency Regional Government's efforts to develop shallot productivity through the reservoir development policy program. **Results.** Based on the research results, it shows that assistance for building embungs has been effective in increasing the potential of shallot farming in Enrekang Regency, thereby reducing the rate of inflation and providing prosperity to farmers. Although the reservoir development assistance policy cannot be realized equally for all farmer groups due to budget constraints, the implementation of this policy has had a positive impact. **Conclusion.** The Enrekang Regency Regional Government's efforts to develop the potential of shallots are through the policy of building reservoirs which has been proven to increase shallot production in Enrekang Regency, although this policy is still not evenly distributed to all shallot farmers due to several obstacles.

**Keywords:** Development, Embung, Shallots

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Implementasi Kebijakan Publik.....	7
2.1.1 Pendekatan Implementasi Kebijakan.....	8
2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	11
2.2 Konsep Pengembangan.....	12
2.2.1 Jenis Pengembangan.....	12
2.2.2 Syarat Pengembangan.....	13
2.3 Penelitian Terdahulu.....	14
2.4 Kerangka Berpikir.....	16
2.5 Skema Penelitian.....	17
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	19
3.2 Lokasi Penelitian.....	19
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	20
3.4 Informan Penelitian.....	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.6 Teknik Analisis Data.....	22
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Enrekang.....	23

4.2	Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah .....	23
4.3	Kependudukan .....	25
4.4	Keadaan Ekonomi .....	27
4.5	Kondisi Pertanian .....	27
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>29</b>
5.1	Upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang Menyediakan Embung untuk Kelompok Tani Bawang Merah.....	29
5.1.1	Membuat Kebijakan Pembangunan Embung .....	29
5.1.2	Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Embung .....	36
5.1.3	Pelaksanaan Program Pembangunan Embung .....	38
5.2	Hambatan Pembangunan Embung .....	44
5.2.1	Tidak Adanya Dukungan Pemangku Jabatan .....	44
5.2.2	Kurangnya Anggaran .....	46
5.2.3	Tidak Meratanya Pembagian Bantuan Embung.....	46
5.2.4	Kurangnya Pengetahuan Petani dalam Pengajuan Bantuan .....	47
<b>BAB VI. PENUTUP.....</b>		<b>49</b>
6.1	Kesimpulan .....	49
6.2	Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Daftar Informan.....	21
<b>Tabel 4.1</b> Luas Daerah di Kecamatan Enrekang.....	25
<b>Tabel 4.2</b> Luas Wilayah, Jumlah Desa, Banyaknya Penduduk dan Kepadatannya Perkecamatan Enrekang.....	26
<b>Tabel 4.3</b> Luas Lahan Bawang Merah Per-Kecamatan.....	27
<b>Tabel 5.1</b> Luas Tanam dan Hasil Produksi Bawang Merah di Kecamatan Anggeraja.....	35

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Bagan Kerangka Pikir .....	17
<b>Gambar 4.1</b> Peta Administrasi Kabupaten Enrekang.....	24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sehingga memberikan peluang besar bagi sebagian besar penduduknya untuk terlibat dalam kegiatan usaha yang berhubungan dengan sektor-sektor tersebut. Pertanian merupakan kegiatan yang esensial bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan makanan setiap hari. Oleh karena itu pengembangan usaha agribisnis menjadi pilihan strategis dan penting, sejalan dengan upaya pemerintah dalam memajukan pertumbuhan ekonomi.

Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat populer di masyarakat dan memiliki prospek dagang yang cerah di Indonesia. Ini adalah produk unggulan Indonesia yang memiliki potensi perkembangan yang luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena tingginya permintaan, bawang merah menjadi salah satu tanaman produksi yang banyak dicari dan diminati. Konsumsi bawang merah di Indonesia mencapai 650.000 ton dan terus meningkat sekitar 5% setiap tahunnya seiring perkembangan industri pengolahan dan pertumbuhan penduduk (Hariyono, Zahro, & Primaswara, 2021).

Tanaman bawang merah biasanya ditanam di daerah dataran rendah, dengan ketinggian antara 10-250 meter di atas permukaan laut, dan suhu berkisar 22-25°C. Meskipun demikian, tanaman ini juga dapat tumbuh di daerah pegunungan, dengan ketinggian mencapai 1200 meter di atas permukaan laut, pada suhu yang sama yaitu 22-25°C. Namun perlu diperhatikan apabila ditanam di daerah pegunungan, umbinya menjadi lebih kecil, warnanya kurang mengkilap, dan umurnya lebih panjang daripada jika ditanam di daerah dataran rendah (Sumiati, 2015).

Budidaya bawang merah adalah salah satu jenis sayuran yang sering ditanam oleh petani di Indonesia dan memiliki permintaan pasar tinggi karena memberikan rasa dan kenikmatan pada masakan. Selain sebagai bahan masakan, bawang merah juga digunakan sebagai obat tradisional. Karena manfaatnya yang beragam, budidaya bawang merah memiliki potensi besar untuk pengembangan di pasar domestik dan ekspor (Farida, Elviani, Afrina, & Wilis, 2023)

Bawang merah adalah salah satu jenis tanaman yang banyak ditanam di Indonesia terutama di Pulau Jawa dan Sulawesi, terutama di Sulawesi Selatan. Salah satu wilayah penghasil bawang merah di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Enrekang. Budidaya bawang merah di Kabupaten Enrekang merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat setempat, bahkan telah menjadi salah satu

mata pencaharian utama. Tidak hanya petani budidaya, tetapi juga petani lain yang kadang-kadang bekerja sebagai buruh tani sering menggantungkan penghasilan mereka pada budidaya bawang merah. Dalam budidaya bawang merah, fokus utamanya adalah pada peningkatan produksi, kualitas produksi, dan pendapatan (Rahim, Pratiwi, & Soci, 2022).

Usaha untuk meningkatkan produksi bawang merah perlu diiringi oleh modal yang besar, sehingga petani bawang merah memerlukan tambahan modal<sup>1</sup>. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang Bersama Bank Indonesia melalui PT Bank BRI (Persero) Tbk menyediakan dana modal dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, yang merupakan jenis kredit terbaru yang dirilis oleh Bank Indonesia. Dana bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro ini dialokasikan untuk delapan Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Enrekang (Hariani, Fatmawati, & Parawangi, 2022).

Pengelolaan sektor pertanian di Kabupaten Enrekang, khususnya dalam hal penanaman bibit bawang merah adalah strategi yang digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Terkadang ketersediaan bawang merah kurang sedangkan permintaan untuk produksi bawang merah yang tinggi, sehingga menyebabkan kenaikan harga. Potensi ini menciptakan nilai tambah dan peluang bagi petani sebagai produsen untuk mendapatkan keuntungan. Namun, harga bawang merah juga dapat mengalami penurunan apabila melimpahnya pasokan bawang merah atau *oversupply* yang mana dapat menimbulkan masalah kerugian pada petani. Padahal kondisi idelanya petani bawang merah seharusnya mendapatkan untung mengingat modal yang dikeluarkan untuk bertani bawang merah itu tidak sedikit, namun dalam prakteknya petani bawang merah yang ada di Kabupaten Enrekang masih sering mengalami kerugian akibat turunnya harga bawang merah.

Setiap tahun, luas lahan pertanian di Kecamatan Enrekang mengalami fluktuasi yang berdampak pada produksi bawang merah dan membuat pendapatan petani juga berubah. Jumlah produksi yang lebih tinggi menghasilkan pendapatan yang lebih besar, tetapi sebaliknya, produksi yang menurun mengakibatkan pendapatan yang lebih rendah.

Menurut Muslimah (2021) perlu diingat bahwa tingginya produksi bawang merah per unit lahan tidak menjamin pendapatan yang tinggi karena faktor seperti harga jual dan biaya input juga berperan penting. Selain itu, kualitas produk bawang merah juga dapat mempengaruhi pendapatan petani, karena kurangnya kualitas dapat menyebabkan penurunan harga jual dan akibatnya pendapatan petani

---

<sup>1</sup> Kurnia Indah Sari, M Ridwan Tikollah, and Sitti Hajerah Hasyim, 'Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Baraka Terhadap Pendapatan Petani Bawang Merah Di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang' (UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, 2018).

bawang merah di Kabupaten Enrekang dapat terpengaruh.

Pemerintah Kabupaten Enrekang telah mengambil tindakan untuk membantu petani bawang merah saat harga rendah melalui kebijakan penetapan harga dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 12A Tahun 2008 yang mengatur Tim dan Petunjuk Pelaksana Harga Pasca Panen untuk komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Enrekang. Tujuan dari penerbitan Surat Keputusan Bupati ini adalah untuk melindungi petani dengan meningkatkan harga komoditi unggulan saat masa panen besar. Harga bawang merah yang cenderung rendah pada masa panen besar selalu berada pada titik impas, yang mengakibatkan kerugian bagi petani. Upaya yang dilakukan adalah dengan pembelian bawang merah di atas titik impas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, sehingga petani bawang merah dapat menghasilkan keuntungan dari usaha mereka dan melanjutkan usaha pertanian mereka selanjutnya (Yudi, 2018).

Masalah lain yang dihadapi petani bawang merah di Kabupaten Enrekang yaitu mereka masih bergantung pada alam untuk sistem pengairan lahannya. Padahal dalam pertanian, air memiliki peran yang cukup sentral dalam pengembangan budidaya pertanian. Maka dari itu Bupati Enrekang Muslimin Bando menyampaikan strateginya untuk menjadikan Kabupaten Enrekang sebagai pusat produksi bawang merah nasional, yaitu dengan melakukan pompanisasi. Ini disebabkan Kabupaten Enrekang, yang terletak di daerah pegunungan mengalami keterbatasan sumber air yang dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian bawang merah. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknologi untuk mengatasi masalah ini<sup>2</sup>.

Kementerian Pertanian (Kementan) telah melaksanakan program pembangunan embung yaitu salah satu program *water management* untuk petani Kabupaten Enrekang. Program pengairan embung ini merupakan inisiatif yang diajukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana (PSP) dengan tujuan mengatur pasokan air yang merupakan kebutuhan pokok dalam sektor pertanian.

Embung atau struktur penampung air ini digunakan untuk menyimpan air hujan dan aliran air dari sungai guna memenuhi keperluan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sebelumnya, petani secara sukarela menyisihkan sebagian lahan mereka untuk membangun penampung air ini untuk kepentingan bersama. Menyambut inisiatif tersebut, pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang mengatur pemanfaatan sumber daya air, termasuk pembangunan embung dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 10,5 miliar pada tahun 2015 dan sebesar Rp. 6,12 miliar pada tahun 2018 (Albar, 2018).

---

<sup>2</sup>Hiru Muhamad, 'Potensi Lahan Bawang Merah Di Enrekang Jadi Destinasi Wisata', *REPUBLIKA*, 2021.



Pembuatan embung ini tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang diantaranya yaitu:

1. Kelompok Tani Suka Pebu di Desa Sumillan, Kecamatan Alla
2. Kelompok Tani Kiwa di Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa
3. Di Desa Mangkawani, Kecamatan Maiwa
4. Di Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja
5. Kelompok Tani Sipakatuo, Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja
6. Di Desa BatuNoni Kecamatan Anggeraja
7. Di Desa Benteng Alla, Kecamatan Baroko
8. Kelompok Tani Sipaturu di Dusun Landoke, Desa Pasui, Kecamatan Buntu Batu
9. Kelompok Tani Tengko Situru, Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio
10. Kelompok Tani Pemuda Tani Karra, Desa Tallung Ura, Kecamatan Curio
11. Di Lando, Desa Taulan
12. Di Desa Kendena, Kecamatan Baraka

Proyek embung ini akan memberikan akses air irigasi bagi kelompok tani yang sebelumnya kurang memiliki fasilitas air dan tidak memiliki sistem irigasi memadai. Namun, tidak semua kelompok tani di Kabupaten Enrekang mendapatkan bantuan embung ini dikarenakan kurangnya anggaran yang ada. Kelompok tani yang mendapatkan bantuan hanyalah mereka yang mengajukan proposal permohonan dan disetujui oleh pusat. Namun, yang diprioritaskan hanyalah kelompok tani yang mendapatkan dukungan dari anggota DPRD. Jadi bisa dipastikan bahwa kelompok tani yang tidak mempunyai pegangan di sektor pemerintahan memiliki potensi yang kecil untuk mendapatkan bantuan embung.

Embung tersebut memberikan dukungan penting bagi petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian, terutama dalam sektor hortikultura. Embung ini bersumber dari mata air dan aliran anak sungai yang berada dekat dengan embung. Sebelum program ini dijalankan, produksi bawang merah hanya mencapai kisaran 5-10 ton. Namun, setelah program embung diimplementasikan, produksi bawang merah mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai angka 10-21 ton.

Dalam pembangunan embung, petani berpartisipasi secara sukarela dalam pembuatan instalansi jaringan irigasi *sprinkler* sebagai sarana untuk mengalirkan air ke lahan guna mendukung pertanian bawang merah. Proyek embung ini dapat dijadikan sebagai contoh kolaborasi antara pemerintah dan petani yang bekerja sama secara efektif. Pemerintah membantu dalam alokasi kegiatan pembangunan embung, sementara petani berkontribusi secara swadaya membangun saluran distribusinya (GLADI AVENTA, 2022).

Meskipun masih ada beberapa masalah terkait penggunaan air dari embung, salah satunya yaitu adanya keterbatasan anggaran yang ada untuk

membangun saluran outlet. Akibatnya, Panjang saluran outlet yang dibangun terbatas hanya sekitar 25 meter dari embung. Namun, walaupun menghadapi sejumlah kendala, petani bawang merah Kabupaten Enrekang tetap aktif berpartisipasi hingga akhirnya mampu menampung air dari sumber tersebut di embung. Selanjutnya, distribusi air tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan pompa air melalui sistem jaringan irigasi *sprinkler*.

Selain itu, budidaya bawang merah seringkali dihadapkan pada masalah-masalah terutama serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). salah satu jenis Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang dianggap paling merusak bagi tanaman bawang merah adalah hama berupa ulat yang aktif memakan daun tanaman bawang merah. Aktivitas ulat ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada tanaman bawang merah, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan produksi hingga berpotensi menyebabkan kegagalan panen.

Serangan hama serangga ini menyebabkan kerugian besar bagi petani bawang merah. Oleh karena itu, para petani bawang merah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Awalnya, penggunaan pestisida adalah solusi utama yang digunakan oleh petani bawang merah untuk melawan serangan hama tersebut. Namun, sekarang pestisida dianggap kurang efektif dan para petani harus menambahkan berbagai jenis pestisida untuk mencapai hasil maksimal. Untuk mengatasi serangan hama tersebut, petani bawang merah telah mencoba berbagai metode. Salah satu tindakan yang diambil petani adalah memasang perangkat hama yang menggunakan lampu pengusir hama atau teknologi *light trap* dan dengan cara menggunakan teknologi kelambu.

Upaya lain yang dilakukan petani bawang merah untuk mengatasi hama yaitu dengan penerapan teknologi kelambu. Kelambu memiliki peran yang unik dalam budidaya bawang merah. Berbeda dari penggunaan kelambu pada umumnya, dimana saat di rumah digunakan untuk melindungi dari nyamuk pembawa penyakit, di Kecamatan Enrekang petani bawang merah menggunakan kelambu sebagai alat untuk mengendalikan hama dan ulat. Pemanfaatan teknologi kelambu ini mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan akan pestisida dan herbisida, sehingga efek negatif dapat dihindari.

Penggunaan teknologi kelambu ini merupakan cara yang paling efektif untuk mendapatkan hasil panen yang menguntungkan, sebab penggunaan lampu pengusir hama atau teknologi *light trap* masih dianggap belum terlalu efektif. Walaupun penggunaan teknologi kelambu ini memerlukan biaya yang besar, namun itu cukup sebanding dengan hasil yang didapatkan. Sebab dengan menggunakan metode ini, serangan hama dapat turun drastis sampai 90%. Sedangkan untuk penggunaan lampu pengusir hama atau teknologi *light trap* masih perlu disemprot tiap hari karena masih banyak terdapat hama yang menyerang tanaman bawang merah.

Dengan melihat berbagai permasalahan yang dihadapi petani bawang merah di Kabupaten Enrekang, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai **“Pengembangan Potensi Bawang Merah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang menyediakan embung untuk seluruh kelompok tani bawang merah?
2. Mengapa beberapa kelompok tani bawang merah di Kabupaten Enrekang tidak menerima bantuan embung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Enrekang menyediakan embung untuk seluruh kelompok tani bawang merah.
2. Untuk menjelaskan dan menggambarkan mengapa beberapa kelompok tani bawang merah di Kabupaten Enrekang tidak menerima bantuan embung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. Manfaat akademis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan Pendidikan khususnya ilmu politik.
  - b. Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan.
2. Manfaat praktis
  - a. Dapat mengetahui strategi seperti apa yang baik agar dapat mengembangkan potensi bawang merah.
  - b. Sebagai bahan masukan apabila suatu saat ada yang membahas mengenai judul terkait dengan pembahasan judul ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian. kerangka teori akan mencakup uraian singkat tentang teori yang digunakan dan cara penerapannya dalam menjawab pertanyaan penelitian.

#### 2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah Tindakan yang diterapkan oleh pemerintah yang berwenang dengan tujuan mencapai hasil yang telah ditentukan untuk kepentingan masyarakat secara umum<sup>3</sup>.

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano adalah upaya strategis dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat atau pemerintahan. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai intervensi yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat, sehingga mereka dapat tetap berpartisipasi dalam pembangunan publik secara menyeluruh<sup>4</sup>

Menurut Anderson sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (1990:19), ada empat konsep utama dalam kebijakan publik. Secara umum kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dengan tujuan mengelola kehidupan Bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Implementasi kebijakan adalah tahap selanjutnya setelah kebijakan diformulasikan. Dalam pengertian umum, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan tindakan-tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan publik, yang juga disebut pelaksanaan kebijakan publik adalah proses dimana sebuah kebijakan diterapkan. Beberapa ahli memiliki pandangan tentang apa itu implementasi kebijakan publik. Menurut Van Meter dan Van Horn mengatakan bahwa serangkaian Tindakan yang dijalankan oleh pejabat-pejabat dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara menurut Leo Agustino, implementasi kebijakan publik adalah proses dinamis yang pada akhirnya mengarah pada pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (Herdiana et al., 2021).

---

<sup>3</sup>Agustino and Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung. Alfabeta, 2016). Hal 10

<sup>4</sup>Dewi and K Rahayu, *Studi Analisis Kebijakan* (Bandung: Pustaka Setia, 2016). Hal. 4

Menurut Daniel dan Paul A.Sabatier dalam (Mirza, 2019) mengartikan implementasi sebagai pemahaman terhadap peristiwa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program diumumkan atau dirumuskan merupakan fokus utama dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat berada pada posisi yang berbeda, tetapi pada dasarnya setiap kebijakan publik selalu diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Karena itu, pelaksanaan menjadi tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konteks pelaksanaan kebijakan baru akan memperlihatkan dampaknya setelah kebijakan tersebut dijalankan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah tahap yang penting dan menentukan dalam proses perumusan atau pembuatan kebijakan selanjutnya. Karena keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh pelaksanaannya. Oleh karena itu, dokumen perumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan memiliki makna atau akan menjadi sekadar rangkaian kata yang formal jika tidak dijalankan. Dalam konteks ini, salah satu indikator keberhasilan suatu strategi atau kebijakan tergantung pada bagaimana pelaksanaannya dilakukan.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dinilai berdasarkan kemampuannya yang konkret dalam melanjutkan dan menjalankan program-program pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Meskipun ada kebijakan implementasi tidak menjamin otomatis keberhasilan pelaksanaan program. Karena itulah, kebijakan implementasi biasanya berjalan seiring dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat bahwa kebijakan implementasi sama pentingnya dengan perumusan kebijakan, maka perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaannya<sup>5</sup>.

### **2.1.1 Pendekatan Implementasi Kebijakan**

Dalam teori dan praktik, pendekatan-pendekatan implementasi dianggap cukup efektif sebagai alat bantu atau penguatan untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Namun, dalam praktiknya, berbagai pendekatan ini memerlukan pertimbangan menyeluruh sehingga pendekatan yang dipilih, disesuaikan, atau mungkin bahkan digabungkan harus dipilih secara tepat sesuai dengan kebutuhan teknis. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan diperlukan pendekatan dan pengetahuan yang komprehensif, sesuai apa yang dijelaskan oleh Nicholas Henry yaitu (Mustari, 2015) :

#### **a. Pendekatan Politik**

Istilah dalam pendekatan ini merujuk pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh di dalam dan di sekitar organisasi birokrasi. Dasar asumsinya

---

<sup>5</sup>Nuryanti Mustari, *Pemahaman KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (PT Leutika Nouvalitera, 2015).

terkait erat dengan dinamika kekuasaan yang terjadi dalam seluruh proses kebijakan publik.

Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik pada akhirnya dipengaruhi oleh ketersediaan dan kemampuan berbagai kelompok kepentingan yang dominan, yang mungkin terdiri dari berbagai koalisi kepentingan yang mendorong agenda mereka. Dalam situasi tertentu. Distribusi kekuasaan juga dapat menghambat dalam pelaksanaan kebijakan, meskipun secara resmi kebijakan publik telah diarahkan.

b. Pendekatan Struktural

Secara umum, dapat disadari bahwa struktur organisasi tampak memiliki relevansi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini mungkin terjadi karena pelaksanaan kebijakan selalu mengalami perubahan, terutama ketika proses pelaksanaannya bersifat dinamis dan tidak selalu berjalan secara linear.

c. Pendekatan Prosedural dan Managerial

Pendekatan struktural prosedural dianggap relevan untuk proses pelaksanaan kebijakan publik, tetapi tidak sebanding dengan usaha untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat. Ini mencakup tatakelola, teknik dan metode yang beragam. Prosedur ini mencakup aspek seperti penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*), dan pengawasan (*controlling*) dalam pelaksanaan kebijakan publik.

d. Pendekatan Perilaku

Pendekatan yang paling terkenal dalam analisis perilaku pada berbagai masalah manajemen sering disebut sebagai pengembangan organisasi atau "*organizational development*". Pendekatan ini menekankan proses untuk menciptakan perubahan yang diinginkan dalam sebuah organisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu perilaku.

Menurut Teori Merilee S. Grindle (1980:11) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar yaitu: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

a. isi kebijakan (*content of policy*) menurut Grindle meliputi:

1) *Interest affected* (kepentingan kelompok sasaran)

Indikator ini menyatakan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan selalu melibatkan berbagai kepentingan, dan bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut memengaruhi pelaksanaannya. Hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut mengenai apakah kepentingan kelompok sasaran ini telah termuat dalam isi kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Enrekang mengenai pengembangan potensi bawang merah.

2) *Type of benefits* (tipe manfaat)

Jenis manfaat yang diterima oleh target. Pada bagian ini isi kebijakan (*content of policy*) berusaha untuk menggambarkan bahwa kebijakan

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang mencakup berbagai jenis manfaat yang menggambarkan dampak positif dari pelaksanaan kebijakan yang direncanakan.

- 3) *Extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)  
Setiap kebijakan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pada bagian ini, isi kebijakan (*content of policy*) ingin menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang diinginkan pemerintah dan khususnya petani bawang merah di Kabupaten Enrekang dari kebijakan yang ada. Dimana kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.
- 4) *Site of decision making* (letak pengambilan keputusan)  
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memiliki peran penting dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada bagian ini perlu dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang mengenai kebijakan yang akan dijalankan, termasuk pertimbangan apakah letak program tersenut sudah tepat.
- 5) *Program implementer* (pelaksana program)  
Untuk berhasil menjalankan suatu kebijakan atau program, dibutuhkan dukungan dari pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi yang memadai. Dalam hal ini harus terdokumentasi secara jelas apakah kebijakan pembuatan embung untuk petani bawang merah di Kabupaten Enrekang pelaksanaannya telah berjalan secara rinci.
- 6) *Resources committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)  
Dalam hal ini menggambarkan apakah sebuah program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang memiliki cukup sumber daya untuk mendukungnya. Penting bagi pelaksana kebijakan untuk memiliki dukungan sumber daya yang memadai agar dapat berjalan dengan lancar.

b. Konteks Implementasi (*context of implementation*)

- a. Mencakup kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*). Dalam suatu kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan, kepentingan, dan strategi yang digunakan oleh aktor yang terlibat untuk memastikan kelancaran implementasinya. Jika hal ini tidak diperhitungkan dengan baik, besar kemungkinan program yang akan diimplementasikan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan.
- b. *Institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)  
Lingkungan di mana suatu kebijakan dijalankan memiliki dampak signifikan pada keberhasilannya. Oleh karena itu, bagian ini bertujuan untuk menjelaskan karakteristik lembaga yang akan ikut mempengaruhi

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

- c. *Compliance and esponsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal penting lain dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah tingkat kepatuhan dan respons dari para pelaksana. Oleh karena itu, pada bagian ini ingin menjelaskan sejauh mana para pelaksana patuh dan merespons kebijakan. Setelah kebijakan diterapkan, yang dipengaruhi oleh kontennya dan konteks lingkungan, akan terlihat sejauh mana para pelaksana telah mengikuti harapan dan apakah kebijakan itu dipengaruhi oleh lingkungan, yang mungkin mengakibatkan perubahan.

Dalam penelitian ini, teori Merilee S.Grindlee (1980:11) digunakan. Yang mengemukakan bahwa kesuksesan implementasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui pengembangan potensi bawah merah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang secara lebih mendalam.

### **2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Menurut Ripley dan Franklin dalam (Suri, 2017), faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi meliputi:

1. Kepastian dan kesepakatan yang tinggi mengenai tujuan-tujuan program di antara para pelaksana.
2. Tingkat perubahan yang diinginkan dalam kebiasaan lama.
3. Jenis orang dan kelompok yang menjadi target implementasi dan penerima manfaat program.

Selain itu, seperti yang terjadi dalam proses perumusan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan juga terdapat dua variable yang memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan pelaksanaan, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya modal.

1. Sumber Daya Manusia
  - a. Motivasi  
Mengandung makna kebutuhan individu yang bersifat pribadi dan internal.
  - b. Kepemimpinan  
Ini merupakan upaya untuk memengaruhi orang-orang agar mereka terarah menuju tujuan organisasi.
  - c. Kinerja  
Ini adalah hasil yang diperoleh seseorang sesuai dengan standar yang berlaku dalam pekerjaan tersebut.



## 2. Sumber Daya Modal

### a. Biaya dan Manfaat

Ini mencerminkan konsep membandingkan kebijakan dengan cara menghitung total biaya dan keuntungan dalam bentuk mata uang.

### b. Biaya dan Efektivitas

Ini melibatkan perbandingan kebijakan dengan cara mengukur total biaya dan dampaknya dalam bentuk pelayanan.

## 2.2 Konsep Pengembangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi kata pengembangan berasal dari kata kembang yang artinya menjadi tambah sempurna (baik dalam aspek pribadi, pemikiran, pengetahuan, dll). Sehingga pengembangan merujuk pada proses, metode, atau tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menyempurnakan sesuatu. Secara istilah, pengembangan mengacu pada rangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan dalam suatu kegiatan tertentu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru<sup>6</sup>.

Menurut H.Malayu. S.P Hasibuan, pengembangan merupakan mengenai individu dalam persiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, baik saat ini maupun di masa depan. Ini memungkinkan manajer untuk menerapkan proses pembelajaran yang telah direncanakan dengan baik untuk memperoleh pengetahuan konseptual, teknik, keterampilan, dan pengalaman pendidikan yang diperlukan (Abdurahman, Firdaus, & Gunawan, 2023).

### 2.2.1 Jenis Pengembangan

Jenis pengembangan secara publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Jenis-jenis pengembangan secara publik meliputi:

#### a. Pengembangan Infrastruktur

Melibatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan kepada masyarakat.

#### b. Pengembangan Ekonomi

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor, 'Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian', *Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 18AD.

program dan kebijakan yang mendukung sektor-sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

- c. **Pengembangan Sosial**  
Fokus pada pembangunan sektor sosial seperti Pendidikan, Kesehatan, perumahan, dan pelayanan sosial lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. **Pengembangan Wilayah**  
Bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola wilayah-wilayah tertentu dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
- e. **Pengembangan Kebijakan**  
Pengembangan kebijakan yang relevan dan efektif untuk mengatasi berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kebijakan Kesehatan, pendidikan, perumahan, dan lain lain.
- f. **Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan program pengembangan untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas.

Jenis-jenis pengembangan ini dapat bervariasi berdasarkan kebutuhan, prioritas, dan kondisi suatu wilayah. Pengembangan seringkali melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor wisata, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih dalam berbagai sektor pembangunan.

### **2.2.2 Syarat Pengembangan**

Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di suatu daerah, maka harus ada setidaknya 5 persyaratan yang perlu terpenuhi, yaitu (Sarneni, 2019):

- a. **Pasaran untuk hasil usaha tani**  
Pembangunan sektor pertanian melibatkan peningkatan produksi hasil pertanian, yang memerlukan adanya pasar yang kuat dengan harga yang cukup tinggi untuk mengkompensasi biaya dan usaha petani. Dalam hal ini, ada tiga aspek penting yang perlu dipertimbangkan: (1) ada individu atau entitas yang memiliki minat dalam membeli produk pertanian dan ada permintaan yang cukup; (2) ada perantar yang berperan dalam distribusi dan sistem perdagangan produk pertanian; dan (3) petani memiliki kepercayaan dalam kelancaran system distribusi ini.
- b. **Teknologi yang senantiasa berubah**  
Peningkatan produksi pertanian terjadi karena penggunaan teknik-teknik atau metode-metode baru dalam kegiatan pertanian. Tidak mungkin mencapai hasil yang lebih tinggi hanya dengan mengandalkan tanaman, hewan, dan lahan yang sama serta metode yang tidak berubah seiring waktu. Untuk menjaga kelangsungan pembangunan pertanian, perubahan terus-menerus harus terjadi. Jika perubahan ini terhenti, maka pengembangan pertanian juga akan terhenti.

- c. Tersedianya sarana produksi secara lokal  
Banyak metode baru yang dapat meningkatkan produksi pertanian, sehingga membutuhkan petani untuk menggunakan bahan dan alat produksi khusus, seperti bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan. Untuk mendukung pengembangan pertanian, semua ini harus tersedia di dekat pedesaan dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan setiap petani yang ingin menggunakannya. Kemungkinan petani untuk membelinya dan terus membeli lagi dari tahun ke tahun akan meningkat jika setiap bahan atau alat memiliki karakteristik berikut: (1) efektif secara teknis; (2) memiliki mutu yang dapat diandalkan; (3) harganya terjangkau; (4) selalu tersedia di satu tempat dan siap kapan pun petani memerlukannya; (5) dijual dalam ukuran atau takaran yang sesuai.
- d. Perangsang produksi bagi petani  
Perangsang yang secara efisien dapat mendorong petani untuk meningkatkan produksi mereka terutama memiliki aspek ekonomis: (1) perbandingan harga yang menguntungkan; (2) pembagian hasil yang adil; dan (3) ketersediaan barang dan jasa yang diinginkan oleh petani untuk kebutuhan keluarganya.
- e. Pengangkutan serta faktor-faktor pelancar  
Pentingnya pengangkutan dalam pengembangan pertanian adalah bahwa tanpa sistem pengangkutan yang efisien dan ekonomis, keempat syarat pokok lainnya tidak dapat dilaksanakan dengan efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor pertanian yang dikelola oleh setiap pemerintah daerah memiliki sifat luwes dalam kemampuannya untuk berkembang dan berdiversifikasi, terutama dalam konteks pengembangan secara keseluruhan. Ini berarti perkembangan sektor pertanian di daerah sebenarnya merupakan cerminan dari upaya pembangunan ekonomi nasional yang diimplementasikan di tingkat daerah.

Seiring dengan perkembangannya, mayoritas petani masih berada dalam kondisi ekonomi yang buruk, dan sektor pertanian mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh tingkat eksploitasi yang tinggi, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, infrastruktur yang kurang memadai, dan minimnya dukungan aktif dari pemerintah setempat untuk memajukan pertanian.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa tentang strategi pengembangan potensi bawang merah yang ada, namun penulis tetap memilih pendekatan yang berbeda untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya.

- 1). Darmawan (2019)  
Judul penelitian "Strategi Pengembangan Usahatani Bawang Merah di

Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengembangan usahatani bawang merah di Desa Sajen, meskipun memiliki faktor-faktor kekuatan dalam kondisi yang baik, tetapi belum optimal dalam memanfaatkan peluang yang ada, sehingga pertumbuhan bawang merah di desa tersebut belum mencapai potensinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi yang lebih proaktif, seperti melakukan ekspansi dan mengoptimalkan pertumbuhan dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan yang tersedia (*strength-opportunities strategy*). Terdapat persamaan dengan penelitian sekarang yaitu pada variable yang digunakan sama-sama menggunakan variable strategi pengembangan dan indikator yang digunakan juga sama. Namun, terdapat perbedaan pada jenis penelitian yang akan digunakan serta pada lokasi penelitiannya, yang mana pada penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Enrekang yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

2). Satar & Buraerah (2020)

Judul penelitian “Analisis Kelayakan dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Bawang Merah di Kota Parepare”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani bawang merah di Kota Parepare selama setiap musim tanam adalah sekitar Rp 9,633,9134.33/0.25 per hektar, dan nilai rasio R/C sekitar 1,91. Oleh karena itu, usaha tani bawang merah di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dinilai efisien secara ekonomi dan layak untuk dikelola dan dikembangkan. Selanjutnya, ada beberapa strategi alternative yang bisa diterapkan untuk mengembangkan usaha tani bawang merah di Kecamatan Bacukiki, termasuk: 1) peningkatan produksi dan kualitas produk melalui penyuluhan, pelatihan, dan kerjasama antar petani; 2) Pemberdayaan kelompok tani untuk memaksimalkan peran mereka; dan 3) Peningkatan potensi kewirausahaan petani melalui pelatihan kewirausahaan dan program magang/studi banding. Terdapat persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu pada objek yang diteliti. Namun yang menjadi pembeda yaitu terletak pada metode penelitian yang akan digunakan, lokasi penelitian serta tahun penelitian juga berbeda sehingga dapat memungkinkan adanya kebaruan pada penelitian yang akan dilakukan.

3). Seran & Taena (2019)

Judul penelitian “Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian dan Strategi Pengembangan Budidaya Bawang Merah (*Allium cepa*. L) di Desa Tes Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi pertanian yang digunakan

mencakup peralatan seperti traktor, kultivator, dan motor air, serta pengelolaan usahatani bawang merah. Analisis skala Likert menunjukkan bahwa presentase penggunaan teknologi dalam usahatani bawang merah yang sesuai dengan standar adalah sebesar 76,38%, sementara yang tidak sesuai dengan standar adalah sebesar 23,38%. Ini mengategorikan tingkat kesesuaian dengan standar. Berdasarkan analisis SWOT, usahatani bawang merah termasuk dalam kuadran I, dengan beberapa alternatif strategi, seperti peningkatan modal usaha yang didukung oleh pemerintah (skor 5,78), akumulasi modal usaha dari petani untuk menghadapi kenaikan harga benih (skor 5,76), dan pelatihan serta penyuluhan dari PPL untuk meningkatkan kualitas SDM petani (skor 3,48).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada variabel yang digunakan yakni pengembangan dan objek yang diteliti sama yaitu bawang merah. Namun perbedaan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode penelitian yang digunakan dan lokasi penelitian yang dipilih pun berbeda.

#### 4). Darsono & Ferichani (2022)

Judul penelitian “Peramalan Luas Tanam dan Strategi Pengembangan Bawang Merah di Kabupaten Wonogiri”. Hasil penelitian yaitu ditemukan delapan strategi pengembangan bawang merah. Strategi yang paling utama adalah strategi OR1 (dengan bobot 0,313) yang melibatkan pelatihan dan Sekolah Lapang yang lebih intensif, yang harus benar-benar terintegrasi dan dapat diukur dalam pelaksanaannya oleh petani. Meskipun demikian, semua tujuh strategi lainnya tetap perlu diperhatikan. Rekomendasi prioritas menggambarkan tingkat pentingnya menerapkan sumber daya. Namun, semua delapan strategi dapat digunakan secara bersamaan untuk saling melengkapi tanpa mengesampingkan salah satunya.

Terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu pada obek yang diteliti yakni bawang merah, sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri dan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak di Kabupaten Enrekang, serta tipe dan jenis penelitian yang digunakan juga berbeda.

## **2.4 Kerangka Berpikir**

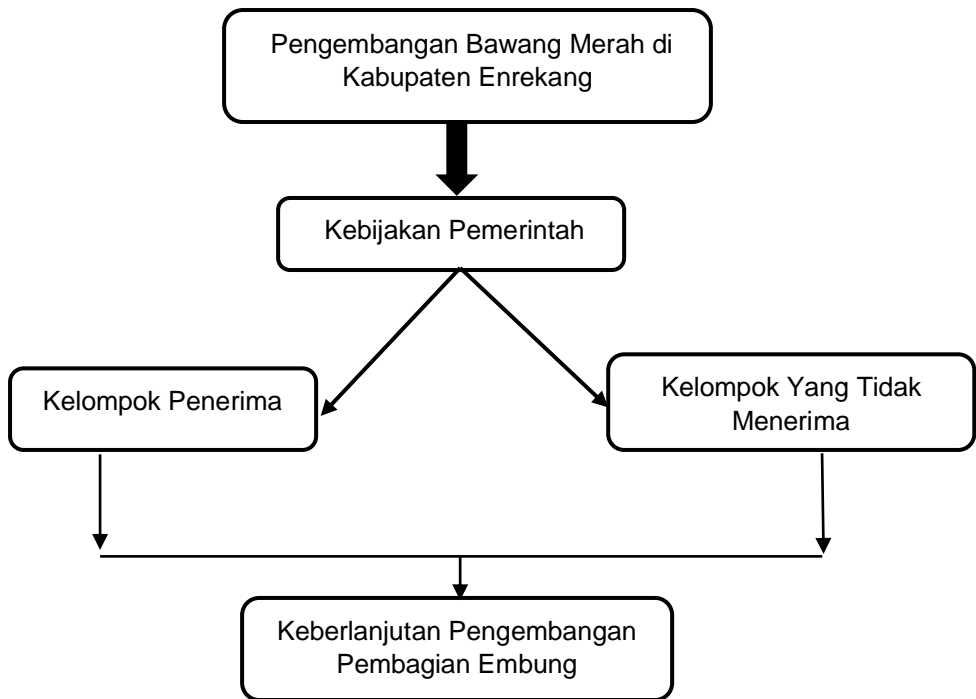
Kerangka pikir digunakan untuk mempermudah memahami tujuan dan maksud dari sebuah penelitian. Penelitian ini membahas tentang Pengembangan Potensi Bawang Merah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas peneliti ingin mengetahui seperti apa

kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat mengembangkan potensi bawang merah yang ada di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk mengembangkan hasil pertanian yaitu bawang merah yang ada di Kabupaten Enrekang.

## 2.5 Skema Penelitian

Dalam mengukur pengembangan potensi bawang merah di Kabupaten Enrekang, pada penelitian ini dengan cara merumuskan upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan potensi bawang merah yang ada di Kabupaten Enrekang. Adapun skema penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**

Berdasarkan skema penelitian diatas, dapat dijelaskan bahwa potensi pengembangan budidaya bawang merah di Kabupaten Enrekang terkait erat dengan akses kelompok tani ke embung. Meskipun ada kebijakan dan upaya dari pemerintah, masalah distribusi dan dukungan politik tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam memaksimalkan potensi sektor pertanian di wilayah tersebut.

Pengimplementasian Pemerintah Kabupaten Enrekang telah merancang dan menerapkan kebijakan untuk membangun embung di wilayah Kabupaten Enrekang. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendukung pertanian, termasuk

budidaya bawang merah. Tetapi meskipun ada kebijakan pembuatan embung, tidak semua kelompok tani di Kabupaten Enrekang memperoleh akses atau manfaat dari pembangunan embung ini. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakmerataan dalam distribusi infrastruktur pertanian di Kabupaten Enrekang. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah dukungan politik. Dimana kelompok tani yang memiliki dukungan politik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang mungkin lebih cenderung mendapatkan embung dibandingkan yang tidak memiliki dukungan politik. Hal tersebut akan berpengaruh pada keberlanjutan pengembangan embung di Kabupaten Enrekang.